

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Agung No. 23P/HUM/2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Buku

Asshidiqie, Jimly. *Konstitusional Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hasani, Ismail. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.

Lailam, Tanto. *Teori & Hukum Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Rosyada, Ikhsan. *Mahkamah Konstitusi: Memahami Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Soemitro, Ronny Hanintijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990.

Soemitro, Ronny Hanintijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Sulisworo, Dwi. *Demokrasi (Bahan Ajar)*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012

Sulisworo, Dwi, Tri Wahyuningsih, and Dikdik Baehaqi Arif. *Hibah Pembelajaran Non Konvensional: Identitas Nasional (Bahan Ajar)*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Jurnal, Artikel

Baehaqi, Ja'far. "Perspektif Penegakan Hukum Progresif Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (September 2013).

Fadhli, Yogi Zul. "Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 Dan Implikasinya Terhadap Akses Keadilan Warga Negara." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (December 20, 2016): 700. <https://doi.org/10.31078/jk1341>.

Indrayana, Denny, and Zainal Arifin Mochtar. "Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Mimbar Hukum* 19, no. 03 (2007).

Malik, Gabriela Akhira, Muhammad Sandi Putra Pratama Maso, Muhammad Ziyad Akbar, and Salsabila Fathona. "PENERAPAN DEMOKRASI BERKEADABAN DALAM KEBUDAYAAN DAN TRADISI SUKU BUGIS." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (December 2, 2021): 701–7. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1987>.

Marzuki, M. Laica. "Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi." *Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (November 2004).

Maulidi, Mohammad Agus. "PROBLEMATIKA HUKUM IMPLEMENTASI PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF NEGARA HUKUM." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (Oktober 2017): 535–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.

Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (December 31, 2021): <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.

Putra, Antoni. "SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG." *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (Maret 28, 2022): <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>.

Rahman, Faiz. "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (May 6, 2020): <https://doi.org/10.31078/jk1712>.

Samekto, FX. Adji. "MENELUSURI AKAR PEMIKIRAN HANS Kelsen TENTANG STUFENBEAUTHEORIE DALAM PENDEKATAN NORMATIF-FILOSOFIS." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (April 30, 2019): 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.

Internet

Website Pengadilan Agama Slawi (5 Agustus 2024)

<https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/822-mengenal-putusan-perdata-dalam-peradilan#:~:text=Menurut%20Rubini%20CSH%20merumuskan%20bahwa,memuat%20pula%20akibat%20Dakibatnya%E2%80%9D>. diakses pada 16 Januari 2025.

Komnas Perempuan. “40 Hak Konstitusional Setiap Warga Negara Dalam 14 Rumpun.” 2020.